

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai suatu pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang dikenakan pemerintah menjadi fokus utama pada pemerintah kabupaten Rote Ndao yakni yang menjabat dalam bidang keuangan. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Prasetya, 2005).

Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dimana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten, kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan (Yusuf, 2016).

Yuliani (2010) menjelaskan rendahnya kualitas dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan atau peran internal audit

masih akan berpengaruh terhadap keterendahan atas ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari, 2008).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang didalamnya meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawab, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan segala bentuk hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah serta berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005.

Pada era saat ini kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memberikan gambaran dan karakteristik mengenai laporan keuangan tersebut apakah laporan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, serta kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di indonesia merupakan salah satu cara agar kita mengetahui kinerja aparat pemerintah dapat dipertanggung jawabkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan APBD yang telah disusun pada awal periode akuntansi dengan menganggarkan pendapatan serta belanja untuk periode saat ini. Setelah berjalan satu periode akuntansi dan akhir periode, antara anggaran pendapatan dan belanja apakah sudah terealisasi sesuai dengan pendapatan dan belanja, serta bisa dilihat apakah ada kenaikan atau penurunan dilaporan realisasi anggaran dan laporan operasional dan hasilnya bisa disimpulkan surplus atau defisit. Jika terjadi surplus atau defisit, pemerintah daerah

harus sudah mempunyai rencana untuk tahun anggaran berikutnya agar jika surplus dananya tidak hanya didiamkan saja atau mungkin bisa diinvestasikan atau untuk hal lain dan jika defisit, pemerintah juga harus bisa menangani supaya tahun anggaran berikutnya agar tidak didefisit (Sriwijayanti, 2018:89-101).

Pengendalian internal dalam suatu entitas sangat diperlukan karena pengendalian internal mengawasi segala aktivitas didalam suatu entitas dan selalu mengontrol semua kegiatan agar sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku dalam entitas tersebut (Pramudityo, 2017). Begitu pula dalam pemerintah daerah harus yang ada pengendalian internalnya agar kinerja para aparat pemerintah daerah bisa diawasi dan aktivitasnya tidak melenceng dari semua aturan perundang-undangan yang ada. Pengendalian internal setiap bulan (atau sesuai peraturan pemerintah daerah setempat) selalu membuat laporan yang berisi tentang kinerja pemerintah daerah setiap bulannya. Dalam laporan audit internal tersebut keseluruhan dirinci, tidak hanya bagian keuangannya saja, melainkan bagian yang lain didalam satu kesatuan pemerintah daerah tersebut (Aldino, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolah keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah tersebut bukannya pada keinginan untuk menganalisis dan membiayai dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolah sumber daya keuangan dalam rangka peningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada lingkungan pemerintah kota

kupang. Sehubungan dengan telahlimpahkannya pengelola keuangan daerah secara mandiri oleh pemerintah kota kupang yang selanjutnya disebut dengansatuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dalam pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri Sekretaris Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan Satuan Polisi Pamomng Praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Satuan kerja ini memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan daerah.

SKPD merupakan pihak yang paling tahu dan berpengalaman dalam mengelolah keuangan daerah, karena setiap hari bertemu dengan transaksi. Penguatan kinerja daerah terutama dalam tata kelolah keuangannya.SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan oleh kepala daerah bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintah daerah dan pelayan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang /aset yang dibutuhkan oleh karna itu,kepala SKPD disebut sebagai penggunaan anggaran (PA) dan penggunaan barang (PB).

SKPD selaku entitas akuntansi pada dasarnya menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang

dikelolah oleh bendahara selaku pejabat fungsional. Pada tingkat pemerintah daerah, satuan kerja yang bekerja yang bertanggungjawab menyelenggarakan akuntansi adalah Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD), satuan kerja ini dapat berupa Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) atau banyak pemerintah daerah berupa Dinas Pendapatan dan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD).

Pada SKPKD transaksi-transaksi akuntansi diklasifikasikan menjadi dua yaitu: transaksi-transaksi sebagai satuan kerja dan transaksi-transaksi sebagai pemerintah daerah dari kedua transaksi tersebut, SKPKD menyusun laporan keuangan sebagai kantor pusat (*home office*). Pada akhir tahun menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap SKPD dengan laporan keuangan yang prosesnya dikerjakan oleh fungsi akuntansi SKPKD. Maka pengelolah dan penatausahaan aset menjadi hal yang sangat penting temuan yang paling dominan yang menyebabkan pemerintah daerah gagal mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terdapat di aset. Nilai aset tetap dapat merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada neraca saldo laporan keuangan. Sehingga penatausahaan aset sangat perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus bisa menguasai pengukuran aset, penyusunan, penilaian kembali, pelepasan aset, dan inventarisasi aset, pemerintah daerah perlu memahami secara detail Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 dan Buletin Teknis Nomor 15 tentang Aset tetap.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan sistematika yang melakukan pengelolaan anggaran daerah serta informasi berkaitan yang dapat dijadikan sebuah data untuk dilaporkan secara transparan untuk penduduk serta

menjadi materi agar dapat mengambil suatu keputusan pada pemerintah daerah (Rosmalita&Nadirsyah, 2020).

Menurut Riva (2021) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi bagi orang yang tepat dengan cara yang tepat dan saat yang tepat. Sedangkan menurut Widia, Maya & Rozi (2021) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk melakukan proses data dan pelaporan informasi baik dengan manual ataupun secara terkomputerisasi tentang kegiatan saran.

Penelitian Roviyantie (2011) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian juga penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliana (2010) tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, mendapatkan kesimpulan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang

dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Sistem informasi akuntansi diperlukan karena didalamnya memuat informasi akuntansi yang berdasarkan komputerisasi yang pada saat ini sangat dibutuhkan dalam membuat laporan keuangan, serta bisa membuat informasi secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Sistem informasi akuntansi membantu para aparat pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya laporan keuangan tersebut akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yakni, pemerintah pusat, BPK (Badan Pengawas Keuangan), inspektorat dan lain-lain untuk diketahui apakah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut sudah selesai dengan aturan-aturan yang berlaku atau belum.

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sektor publik merujuk pada organisasi publik (terutama pemerintah), yaitu organisasi yang menggunakan dana masyarakat dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Rosmalita & Nadirsyah (2020) sistem informasi

akuntansi keuangan daerah merupakan sistematis yang melakukan pengelolaan anggaran daerah serta informasi berkaitan yang dapat dijadikan sebuah data untuk dilaporkan secara transparan untuk penduduk serta menjadi materi agar dapat mengambil suatu keputusan pada pemerintah daerah. Sehingga organisasi sektor publik juga dituntut untuk bertahan, berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan.

Kinerja pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna (Suartana, 2017). Agustina (2021) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai organisasi dalam periode tertentu. Suartana (2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang telah dicapai oleh pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2018:2) istilah “Sektor publik” memiliki pengertian yang bermacam-macam dikarenakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, sosial, politik dan hukum) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

Dari uraian di atas maka penulis menemukan suatu hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Internal Audit Sebagai Variabel Intervening pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao”**.

## **1.2 MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti yaitu, rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan atau peran internal audit akan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka, penulis meneliti pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan internal audit sebagai variabel intervening pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

## **1.3 PERSOALAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan internal audit sebagai variabel intervening ?

## **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan internal audit sebagai variabel intervening.

## **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah diberbagai daerah,diantaranya sebagai berikut:

### **1. Manfaat akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan internal audit sebagai variabel intervening pada Badan Keuangan DaerahKabupaten Rote Ndao.

### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait sebagai berikut:

#### **a. Bagi penulis**

Memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan internal audit sebagai variabel intervening pada BadanKeuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

b. Bagi instansi/pemerintah

Bisa dijadikan referensi dalam hal pemanfaat sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan internal audit sebagai variabel intervening pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

c. Bagi pembaca

Dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan tentang pemanfaat sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan internal audit sebagai variabel intervening pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.